

SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0001/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;

b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi,

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

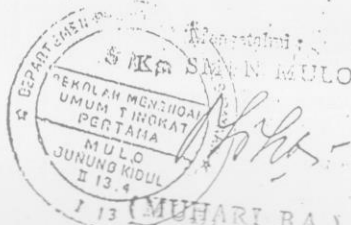
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 11 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 12 tahun 1977;
6. No. 59/M tahun 1978;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0001/U/1975;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/D tahun 1975;
3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat
pula

Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. D-100/I/MENPAN/2/79.



MEMUTUSKAN :

Dengan mencahut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6. Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

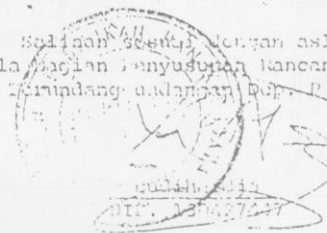
(A. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
Ketua M-BK pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan M-BK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
10. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
11. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P. H. dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
13. Semua Koordinator Perjuruan Tinggi Swasta,
14. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Ditjen. Pajak,
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
19. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
20. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPENAS,
25. L.I.P.I.,
26. Ketua DLR-KI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan seperlunya.

Salinan Keputusan dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Bantul	23.	ST Neg. I Bantul	Bantul Timur Bantul	SMT Neg. Pretek	Krotek Bantul	Yogyakarta	
		24.	ST Neg. II Bantul	Bantul Timur Bantul	SMT Neg. Tantiarito	Tantiarito Kasihan Bantul	Yogyakarta	
	Kab. Gunung Kidul	25.	SMT Neg. Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMT Neg. W. Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		26.	SMT Neg. Panaran	Panaran Gunung Kidul	SMT Neg. Panaran	Panaran Gunung Kidul	Yogyakarta	
		27.	SMT Neg. Seranu	Seranu Gunung Kidul	SMT Neg. Seranu	Seranu Gunung Kidul	Yogyakarta	
		28.	SMT Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	SMT Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	Yogyakarta	
		29.	SMT Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	SMT Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	Yogyakarta	
		30.	ST Neg. I Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMT Neg. Bijiharjo	Bijiharjo Karangmojo Gunung Kidul	Yogyakarta	
		31.	ST Neg. II Wonosari	Bandung Wonosari Gunung Kidul	SMT Neg. Bandung	Bandung Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		32.	ST Neg. III Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMT Neg. Mulo	Mulo Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		33.	ST Neg. Candi/Tumpang Patuk	Patuk Gunung Kidul	SMT Neg. Patuk	Patuk Gunung Kidul	Yogyakarta	